



**IMPLEMENTASI PROGRAM URBAN FARMING DALAM  
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT PERKOTAAN  
( Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Negara

Oleh:

**SHINTA DEVY SETYANINGRUM**

**(21701091049)**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**MALANG**

**2021**



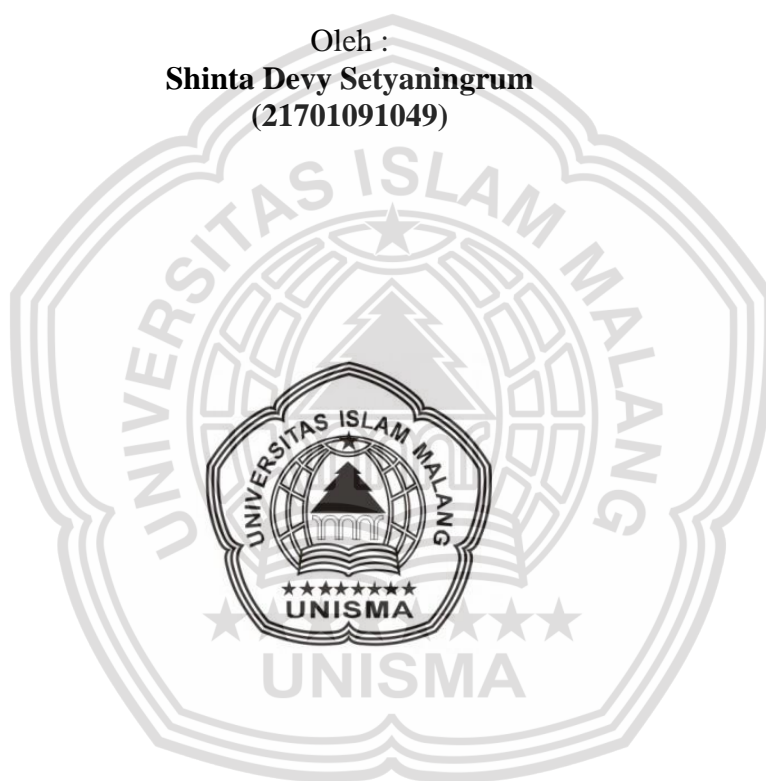
**IMPLEMENTASI PROGRAM URBAN FARMING DALAM  
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT PERKOTAAN  
(Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Skripsi Administrasi Negara

Oleh :

**Shinta Devy Setyaningrum  
(21701091049)**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
MALANG  
2021**

## ABSTRAK

Shinta Devy Setyaningrum, 2021 NPM 21701091049, Program Studi Ilmu Administrasi Public Fakultas Ilmu Administrasi Islam Malang. Implementasi Program Urban Farming Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Perkotaan (Studi Kasus Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang), Dosen Pembimbing I: Dr. Nurul Umi Ati, M.AP, Dosen Pembimbing II: Suyeno, S.Sos., M.AP

Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan pelaksanaan program urban farming salah satu wujud dari upaya pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan dalam hal kebutuhan mereka dibidang pangan. Dengan program ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga serta memotivasi mereka membentuk kelompok pertanian guna membangun dirinya menjadi lebih mandiri dan maju. Adapun yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk membuat skripsi ini didasarkan pada hasil pengamatan awal penulis melihat dari masalah pergeseran lahan pertanian akibat pembangunan infrastruktur di Kota Malang cukup mengganggu bagi kondisi pangan dan gizi masyarakat, oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi program urban farming dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program urban farming di Kota Malang.

Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, yang merupakan sebuah gambaran dari peristiwa dan fenomena yang terjadi saat dilapangan, pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan perpanjangan pengeamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi, analisis negative, *membercheck* yang bertujuan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan lima komponen yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan lapangan, rekaman wawancara.

Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa implementasi program urban farming di Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Penanggungan dilakukan dengan baik. hal ini sudah sesuai dengan yang dipaparkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno (2014:159-168) dalam model-model implementasi kebijakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber-sumber kebijakan, Karakteristik Badan Pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, Sikap Para Pelaksana, Kondisi ekonomi, sosial dan politik. (3) faktor pendukung yang sudah sesuai deng apa yang sudah dijelaskan oleh



Edwards III bahwa ada 4 poin yang dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan yang diantaranya adalah: (1) komunikasi (2). sumber daya (3). Sikap birokrasi dan pelayanan (4). Struktur organisasi dan tata aliran kerja birokrasi.



**Kata kunci : implementasi program *urban farming* di Kota Malang**



## ABSTRACT

Shinta Devy Setyaningrum, 2021 NPM 21701091049, Public Administration Study Program, Faculty of Islamic Administration Malang. Implementation of the Urban Farming Program in Improving the Quality of Life of Urban Communities (Case Study of the Food and Agriculture Service Office of Malang City). First Advisor: Dr. Nurul Umi Ati, M.AP, Supervisor II: Suyeno, S.Sos., M.AP

---

This research is the result of research that describes the implementation of the urban farming program as a manifestation of the efforts of the Malang City government in improving the quality of life of urban communities in terms of their needs in the field of food. With this program, it can improve the economy and family welfare and motivate them to form agricultural groups in order to build themselves to be more independent and advanced. As for the background, the author is interested in making this thesis based on the results of the initial savings. The authors see the problem of shifting agricultural land due to infrastructure development in Malang City which is quite disturbing for the food and nutrition conditions of the community, therefore the author wants to know how to implement the urban farming program in improving quality. living in urban communities and supporting and inhibiting factors in the implementation of the urban farming program in Malang City.

This research method is to use a qualitative approach and descriptive type of research, which is a description of events and phenomena that occur in the field, the data collection is done by interviewing, observation, and documentation techniques. Researchers used extended observations, increased persistence, triangulation, discussion, negative analysis, member check which aimed to check the validity of the research data. Data analysis in this study used five components, namely the researcher himself, interview guidelines, observation guidelines, field notes, and recorded interviews.

The results of this study indicate that the implementation of the urban farming program in Kelurahan Dinoyo and Kelurahan Penanggungan is carried out well. this is in accordance with what was described by Van Meter and Van Horn (in Winarno (2014: 159-168) in policy implementation models there are six variables that affect implementation performance, namely: Policy size and objectives, policy sources, characteristics Implementing Agency, Communication between related organizations and implementation activities, Attitude of Implementers, Economic, social and political conditions. (3) supporting factors that are in accordance with what has been explained by Edwards III that there are 4 points that can encourage the success of policy implementation which it includes are: (1) communication (2) resources (3)



attitude of bureaucracy and services (4) organizational structure and bureaucratic work flow procedures.

**Keywords: implementation of the urban farming program in Malang City.**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dijelaskan bahwa dalam menjadikan suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya hal tersebut, adanya pembangunan Indonesia dapat ditentukan melalui kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kesejahteraan sendiri adalah sesuatu yang diinginkan oleh seluruh orang. Kesejahteraan yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang dimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut tidak hanya menjadi sebuah tugas suatu negara melainkan kesejahteraan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat juga wajib menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan juga memastikan rakyatnya berada dalam keadaan yang sehat dan aman.

Kesejahteraan hidup masyarakat perkotaan pada sektor pertanian sedikit banyak menimbulkan permasalahan baik di segi lingkungan maupun aspek lainnya. Meningkatnya populasi dan pembangunan infrastruktur di kawasan perkotaan menyebabkan sering terdapat konversi lahan, jumlah penduduk semakin meningkat sedangkan persediaan bahan pangan menurun yang menimbulkan penurunan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Kondisi seperti ini seharusnya pemerintah beserta masyarakat mencoba mencari jawaban yang tepat agar masyarakat perkotaan dapat memenuhi kebutuhan dalam ketahanan pangan

lebih mandiri dan lebih maju. Permasalahan ketahanan pangan dan gizi merupakan dasar bagi keberadaan dan kedaulatan suatu negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nyatanya sampai saat ini beberapa kota besar masih bergantung pada hasil desa yang dimana termasuk kawasan bidang pangan.

Implementasi adalah salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Dengan dilaksanakannya implementasi setelah sebuah kebijakan dibuat dengan tujuan yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2008:146-147) menjelaskan implementasi kebijakan publik sebuah tindakan-tindakan dalam pengambilan keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan yang mencangkup cara-cara dalam mengubah keputusan-keputusan menjadikan sebuah tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan cara-cara untuk mencapai sebuah perubahan baik kecil maupun besar yang akan ditetapkan berdasarkan keputusan kebijakan dari organisasi publik yang tugasnya agar mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan.

Program *urban farming* merupakan implementasi kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengangkat program yang berhubungan dengan pertanian di sektor kota yang melibatkan keahlian, inovasi dalam pengelolaan pangan bagi masyarakat kota dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong di sekitar kota guna meningkatkan kesehatan, ekonomi, dan kualitas hidup keluarga serta memotivasi Keluarga agar lebih produktif dalam memanfaatkan lahan yang ada di sekitar mereka, yang saat ini luas lahan pertanian semakin sempit dengan adanya pembangunan alterasi lahan. Wilayah perkotaan adalah wilayah yang sangat padat dengan adanya para pengusaha membuat di bidang industri, hotel, kawasan pemukiman, ruko. Data dari Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang pada tahun 2017 luas lahan mencapai 1.104 hektar, dan pada tahun 2018 pertanian di Malang lahannya menyusut akibat tingginya pembangunan menjadi 1.065



hektar, pada tahun 2019 mencapai 1.014 hektar. Dari data tersebut mengidentifikasi semakin tinggi jumlah perpindahan penduduk di daerah perkotaan maka semakin berkurang lahan pertanian di Malang per tahun. Keadaan seperti ini memerlukan perhatian dari pemerintah kota Malang untuk menyikapinya.

Fakta industrial ini membuat luas lahan pertanian aktif menjadi semakin mengecil karena timbulnya ahli fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan industri, pembuatan pemukiman rumah, pembuatan jalan dan lain-lain. Adanya ahli fungsi lahan terhadap sektor industri tersebut, membuat masyarakat yang bekerja sebagai petani lebih memilih untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai petani dan menjadi pekerja di sektor industri. Apabila kondisi seperti ini jangka panjang maka keadaan ketahanan pangan masyarakat perkotaan di Indonesia juga menjadi semakin buruk disebabkan lahan sektor pertanian yang semakin sempit.

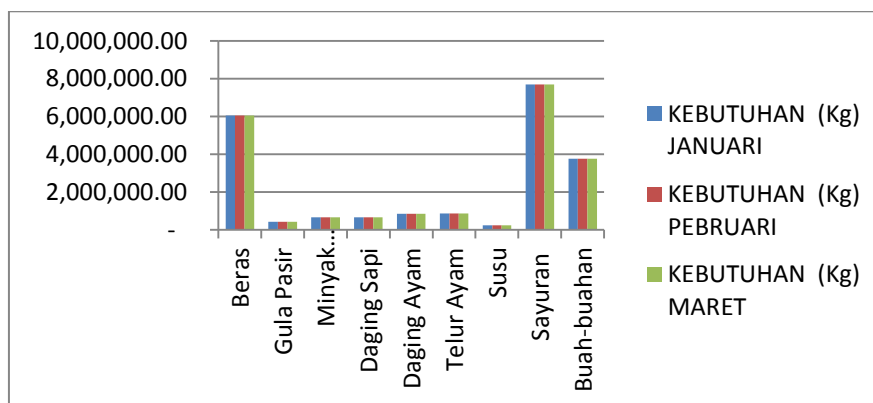
Dalam hal ini lahan yang diartikan adalah lahan pertanian untuk bercocok tanam sebagai sumber kehidupan, sedangkan menurut masyarakat perkotaan lahan merupakan ruangan yang bisa digunakan dalam mendirikan toko, mall, rumah dan lain-lain. Permasalahan ketersediaan lahan sangat terbatas membuat pemerintah dan masyarakat melakukan perubahan fungsi lahan yang bisa disebut konversi lahan. Konversi lahan lebih dikenal sebagai perubahan fungsi lahan yang awalnya lahan pertanian menjadi lahan industri, infrastruktur lainnya yang menjadi ancaman yang sangat serius bagi ketahanan pangan masyarakat perkotaan disebabkan dampak yang timbul bersifat permanen.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 pasal 1 tentang penataan ruang di Indonesia, dalam penataan ruang adalah suatu

sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Salah satu yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan dalam segi ekonomi, sosial dan lingkungan tentang ketersediaan pangan. Namun, kurangnya akan kebutuhan pangan disebabkan konversi lahan bertani semakin sempit dan pastinya mempengaruhi produktivitas dan kualitas hasil pertanian di wilayah tersebut dikarenakan jumlah masyarakat perkotaan yang semakin padat. Sehingga kota harus bergantung pada hasil desa yang menyediakan bahan pangan. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang dengan jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2020 sekitar 874,890. Kebutuhan pangan sayuran pada bulan januari, februari dan maret 2020 sekitar 7,683,287,67. Dibandingkan dengan kebutuhan pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng/mentega, daging sapi, daging ayam sebagainya. Kebutuhan sayur sangat tinggi, dibandingkan kebutuhan pangan lainnya yang menandakan kepentingan kebutuhan sayur dalam ketahanan pangan dan gizi penduduk Kota Malang.

**Gambar 1.1** Data kebutuhan dan ketahanan pangan Kota Malang pada bulan Januari, Februari, Maret tahun 2020



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang tahun 2020.

Sebagaimana mengutip dari berita liputan6.com, Zainul Arifin (2018), dalam berita ini menjelaskan kota Malang selama ini masih mengandalkan hasil pertanian daerah luar agar tetap menjaga ketahanan pangan masyarakat di Kota Malang. Bahan pangan di Kota Malang berasal dari kabupaten Malang dan pasuruan yang banyak didistribusikan ke Kota Malang. Hal ini bisa dapat terjadi dikarenakan adanya pemangkasan lahan pertanian di perkotaan membuat kelompok masyarakat yang menderita secara langsung.

Pemangkasan lahan berpengaruh pada sektor pertanian, seperti masalahnya ketersediaan pangan dalam jumlah besar dan bernutrisi bagi kualitas hidup masyarakat perkotaan. Dari permasalahan ini masyarakat perkotaan belum sadar dengan isu ketahanan pangan sehingga memulai awal untuk aktivitas *Urban Farming*, masih banyaknya masyarakat atau komunitas yang berharap adanya bantuan sarana prasarana *Urban Farming* dalam permasalahan ketahanan pangan dan pemangkasan lahan masih bisa dikatakan rendah. Semua pihak bekerjasama dari pemerintah Kota Malang bersama masyarakat bersama-sama membangun ketahanan pangan di wilayah yang terkait pemangkasan fungsi lahan tersebut. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan bersamaan dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan pangan dan gizi yang menyatakan ketahanan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun muatannya, aman, merata dan terjangkau. Ditambah dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan yang menyebutkan keamanan pangan menjadi upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merusak, dan membahayakan kesehatan manusia. Melalui definisi tersebut menjelaskan ketahanan pangan dan gizi, dan juga keamanan pangan menurut Undang-Undang dan Peraturan

Pemerintah tersebut merupakan tolak ukur pemerintah dalam meningkatkan kesehatan kualitas masyarakat perkotaan di wilayah tersebut.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan suatu daerah diperlukan ketahanan pangan yang baik sehingga kebutuhan setiap keluarga dan kelompok kecil mampu terpenuhi kesediaan pangannya dengan cukup. Selain itu dalam mewujudkan ketahanan pangan diperlukan tanggung jawab nasional sesuai yang tercantum dalam Garis-Garis Haluan Negara 1999-2004 menjelaskan dalam mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya pangan, kelembagaan dan budaya lokal, dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi, baik jumlah maupun mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau, dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani atau nelayan serta produksi yang diatur dengan Undang-Undang. Saat akses pangan mudah maka masyarakat perkotaan akan dapat meningkatkan kualitas hidup dengan aman dalam kesehatan bebas dari bahan kimia dan harga yang bisa dijangkau dari semua khalayak masyarakat. Kualitas pangan masyarakat perkotaan menjadi salah satu topik menarik yang perlu dikaji dalam menilai implementasi program ketahanan pangan masyarakat perkotaan.

Berbicara mengenai program, maka salah satu terobosan baru bentuk kebijakan atau program yang dihadirkan oleh pemerintah Indonesia adalah program *Urban Farming*. Program *Urban Farming* mempunyai konsep sebagai pertanian perkotaan yang sudah banyak dilaksanakan di kota-kota Indonesia. Program *Urban Farming* disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan di dalam kota dan pinggiran kota agar bisa memproduksi, mengolah, mengedarkan beraneka produk pangan, dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar

masyarakat, manusia dan produk jasa yang didapatkan dari sekitar daerah urban yang akan digunakan sebagai pendapatan dari sumber daya alam, manusia dan produk jasa di daerah urban tersebut.

Menurut Santoso dan Widya (2014) menjelaskan pertanian perkotaan (*Urban Farming*) merupakan gerakan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dan menjadikan alternatif baru yang bertujuan untuk dapat menjaga ketahanan pangan dan gizi masyarakat khususnya pada skala keluarga/rumah tangga.

Pada umumnya memang diakui masih banyak dijumpai kawasan perkotaan di Indonesia yang belum menerapkan program *urban farming*. Kebanyakan kendala yang sering dijumpai di Kota Malang.

Mengutip dari Ahmad Nur Said NST (2019) menjelaskan kurangnya minat masyarakat perkotaan, sarana dan prasarana yang didukung oleh pemerintah kota, kurangnya pemahaman masyarakat perkotaan terhadap penerapan program *Urban Farming* dan mengingat aktivitas masyarakat perkotaan yang mempunyai waktu terbatas karena harus bekerja dari pagi hingga sore dan menyebabkan sulitnya untuk menerapkan program tersebut.

Kendala yang ada di Kota Malang menurut Kepala Seksi Bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan (2020) menjelaskan kendala yang berada di kota malang secara umum hampir sama dengan kawasan perkotaan daerah Indonesia dimana adanya kendala Masyarakat belum sadar dengan isu ketahanan pangan, Pemahaman masyarakat mengenai program urban farming, tidak ada lahan dan kurangnya waktu untuk melakukan program Urban farming dikarenakan waktu kerja dari pagi hingga sore.

Program *Urban Farming* yang ada di Kota Malang merupakan salah satu program yang diterapkan oleh pemerintah kota melalui dinas-dinas terkait khususnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan penyelenggaraan penyuluhan dan unsur teknis



operasional pemerintahan di bidang pertanian, peternakan dan ketahanan pangan yang menunjang program-program pertanian, peternakan dan ketahanan pangan di tingkat pusat maupun daerah agar mendorong keberadaan kaum tani kota yang dijelaskan pemerintah kota sebagai salah satu solusi dari isu-isu aktual yang saat ini berkembang di masyarakat perkotaan mengenai lingkungan, ekonomi dan ketahanan pangan terkhusus dalam skala keluarga/rumah tangga hingga skala kecil. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang terdaftar program *Urban Farming* di Kota Malang sudah tersebar di lima kecamatan, diantaranya seperti :

**Tabel 1.1** Jumlah Kecamatan mengikuti Program Urban farming 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan mengikuti program Urban farming
1.	Lowokwaru	12
2.	Kedungkandang	12
3.	Belimbing	11
4.	Sukun	11
5.	Klojen	11

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang*

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Seksi Bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan bahwasanya sudah ada lima kecamatan yang menjalankan program *Urban Farmin*. Dijelaskan kecamatan terdiri dari Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Kedungkandang.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “Implementasi Program Urban Farming Dalam



Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Perkotaan (Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Malang)”.

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana implementasi program Urban farming dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan di Kota Malang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dari implementasi program urban farming dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan di Kota Malang?

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam Implementasi Program Urban farming dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Perkotaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang. Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Implementasi Program Urban farming dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Perkotaan di Kota Malang menurut model implementasi dengan Van Meter dan Van Horn (Winarno, (2014:159-168) sub fokus:
  - a. Ukuran dan tujuan kebijakan
  - b. Sumber-sumber kebijakan
  - c. Karakteristik Badan Pelaksana
  - d. Komunikasi antar organisasi
  - e. Sikap para pelaksana
  - f. Kondisi Sosial, ekonomi, dan politik
2. Mengidentifikasi Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam Implementasi program Urban farming dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan di Kota Malang.

“Kaitanya dengan faktor penghambat dan pendukung menurut Wibowo dalam Mallu (2018:273) menjelaskan bahwa faktor pendukung merupakan hal atau suatu kondisi yang dapat menunjang atau menumbuhkan suatu kegiatan, usaha maupun suatu produksi. Sedangkan faktor penghambat merupakan hal maupun kondisi yang dapat menghambat atau menggagalkan suatu kegiatan, usaha maupun produksi.”

Menurut Edward III menyatakan ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi berhasil tidaknya suatu program implementasi. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

1. Komunikasi.
2. Sumber daya.
3. Sikap birokrasi atau pelaksana.
4. Struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi.

Dengan begitu sub fokus dalam faktor pendukung dan penghambat yang akan peneliti kembangkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Faktor pendukung implementasi program *Urban farming*.
  1. Kerjasama dengan pihak-pihak tertentu.
  2. Sosialisasi mengenai program *Urban Farming*.
  3. Pemanfaatan lahan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.
- b. Faktor penghambat implementasi program *Urban farming*.
  1. Ukuran kebijakan program *urban farming*.
  2. Pemahaman masyarakat mengenai program *urban farming*.
  3. Pola fikir masyarakat
  4. Ketersediaan lahan dan anggaran dalam kegiatan program *Urban Farming*.

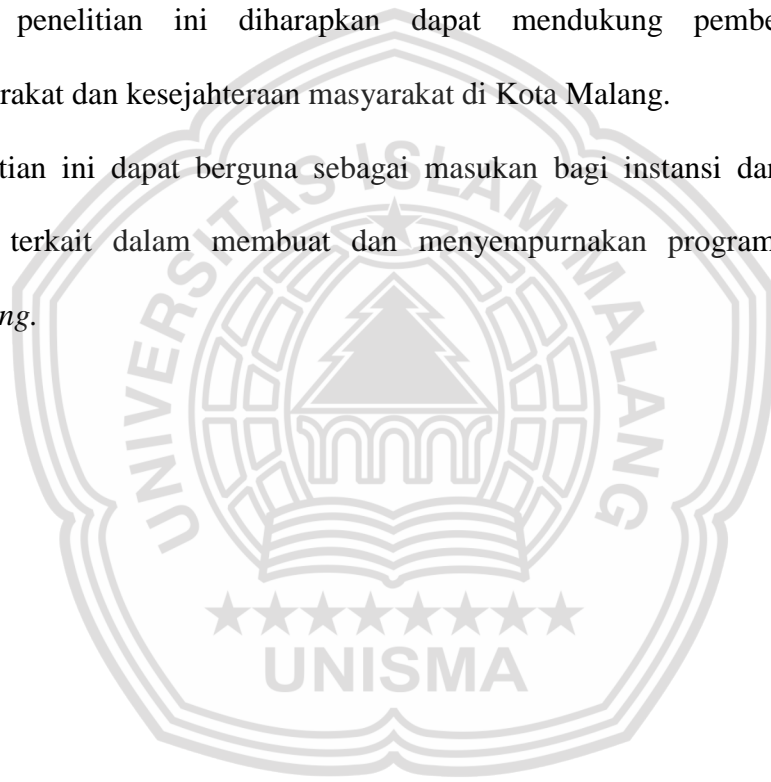
#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan program program *Urban Farming* yang ada di Kota Malang.

2. Untuk memahami dan mengetahui pengaruh adanya program *Urban Farming* sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan di Kota Malang.
3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan program *Urban Farming* di Kota Malang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang.
2. Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan bagi instansi dan pihak-pihak terkait dalam membuat dan menyempurnakan program *Urban Farming*.





University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## BAB VII

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Melalui penelitian yang telah dilaksanakan dan berdasarkan data yang diperoleh dan dilakukan analisis oleh peneliti maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian diatas mengenai implementasi program *urban farming* dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan di Kota Malang. Bawah program *urban farming* merupakan program yang direncanakan oleh pihak Pemberdaya Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Malang bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang pada tahun 2019 merupakan program yang ditunjuk untuk permasalahan ketahanan pangan masyarakat dikarenakan konversi lahan perkotaan yang semakin sedikit.

Pembentukan program ini telah disesuaikan dengan unsur kebijakan yang terdapat pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi dan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang membahas tentang kemandirian, ketahanan pangan dan gizi. Sebagian besar program *urban farming* ini sudah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang berada di Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Penanggungan, dalam memanfaatkan lahan yang mereka miliki dalam meningkatkan kualitas hidup dalam hal kebutuhan pangan keluarga secara mandiri, masyarakat telah mampu memasarkan produknya dipasaran dan mendapatkan manfaat finansial dari hasil penjualan produk hasil program *urban farming*, selain itu, bertujuan mengurangi pengeluaran belanja rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan

masyarakat semangat untuk mengembangkan diri dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program *urban farming*.

Melalui program ini masyarakat perkotaan yang beberapa diantara cuek terhadap lingkungan dapat terjalinnya interaksi sosial dan kerjasama dalam bermasyarakat melalui gotong royong dan mengeduksi masyarakat dengan memproduksi bahan pangan dari budidaya tanaman dilahan-lahan yang dianggap tidak dapat digunakan menjadi lahan yang produktif

Tetapi, dalam proses imlementasi *urban farming* di Kota Malang, khususnya yang berada di Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Penanggungan, terdapat faktor penghambat yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan dan kegiatan program *urban farming* diantaranya tidak ada ukuran kebijakan program *urban farming* yang berada di Kota Malang, kurangnya pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan program dikarenakan masyarakat perkotaan masih terlalu cuek terhadap lingkungan, kurangnya pengawasan dan evaluasi oleh pihak-pihak yang bersangkutan setelah sosialisasi dan pemberian bantuan diberikan. Sehingga minat dan kemauan masyarakat dalam berpartisipasi dalam program *urban farming* tidak berjalan secara efektif bahkan sampai terhenti ditengah jalan.

Selain itu sulitnya merubah pola fikir dan minat atau kemauan masyarakat perkotaan yang sudah terbiasa mendapatkan bahan pangan dengan mudah dari pada menghasilkan sendiri bahan-bahan yang ditawarkan dalam pelaksanaan program *urban farming* yaitu sayuran dan buah-buahan dengan cara budidaya dengan bahan alami. Selain itu ketersediaan lahan, hama dan cuaca juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program *urban farming*.



Adapun implementasi program *urban farming* yang berada di Kota Malang sudah sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn karena sudah memenuhi ke 6 model implementasi kebijakan yang sudah diisyratkan dalam hal pelaksanaan seperti halnya (ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksanaan, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dan sikap pelaksana). Namun adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan program *urban farming* menjadi kurang efektifnya dan kurang efisien.

Demikian juga yang terjadi dalam faktor-faktor pendukung yang ada dalam implementasi program *urban farming* di Kota Malang sudah sesuai dengan yang diungkapkan oleh Edwards III karena program *urban farming* sudah memenuhi unsur-unsur pendukung pelaksanaan program yang diantaranya adalah komunikasi, sumberdaya, sikap birokrasi dan pelaksana dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan data dan penelitian yang sudah diperoleh peneliti secara langsung dilapangan, maka peneliti memberikan saran /masukan yang dapat dijadikan sebagai beberapa bahan untuk dapat dipertimbangkan bagi para pihak bersangkutan maupun terkait dalam pelaksanaan penelitian.

1. Pihak/instansi terkait yang bersangkutan Menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) hal ini dikarenakan tidak adanya aturan hukum dalam tujuan untuk menjamin dan melindungi pelaksanaan program *urban farming* di Kota Malang.

2. Pihak-pihak terkait diharapkan lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal pengawasan dan mengevaluasi, Mengadakan sosialisasi dan bimbingan mengenai cara untuk mengatasi permasalahan dalam bidang pertanian untuk memberikan pemahaman masyarakat terkait perawatan tanaman seperti halnya mengatasi hama serta hambatan lainnya, agar hasil yang di dapatkan lebih maksimal.
3. Melibatkan pihak dari akademis untuk memberikan pemahaman dan bimbingan kepada setiap keluarga, lebih sering mengadakan acara-acara atau sosialisasi tentang manfaat program urban farming yang bertujuan untuk menumbuhkan minat masyarakat dan meningkatkan serta mengubah pola fikir masyarakat mengenai program *urban farming*.
4. Pihak instansi/badan-badan lebih memaksimalkan tugas dan fungsi dalam hal yang harus ditanam oleh masyarakat. Karena akan lebih baik masyarakat lebih berfokus kepada tanaman sayuran dan toga untuk kebutuhan pangan yang tidak membutuhkan banyak lahan. Contoh tanaman yang dibutuhi tanaman pangan tomat, terong, sawi dan cabe dan toga. Mengajak pihak lain seperti pihak swasta untuk bekerjasama dalam mengembangkan pelaksanaan program *urban farming*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Center of Academic Publishing Service : Yogyakarta
- Solochin Abdul, Wahab. 2015. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara : Jakarta
- Anonymous. 2007. *Urban Farming Againsts Hunger*. Appropriate Technology. Hemel Hempstead: Vol. 34, Iss. 1, p. 15-17 (3pp).
- Butler, L. & D.M. Moronek. 2002. *Urban and Agriculture Communities: Opportunities for Common Ground*. Ames Iowa: Council for Agricultural Science and Technology.
- Sugiyono, 2008. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* : Bandung, Alfabeta
- Adi, Isbadi, Rukminto. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. FISIP UI PRESS
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik*. Intrans Publishing : Malang

### Sumber Jurnal dan Skripsi

- Ahmad, Nur Said. 2019. *Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan Kawasan Perkotaan Melalui Program Urban Farming di Kota Malang (studi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang)* . Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lilik Wahyu Athariyanto. 2013. *Implementasi Program Urban Farming Di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya* . Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Universitas Negeri Surabaya.
- Anissya Noer Wiyanti. 2013. *Implementasi program Urban Farming Pada Kelompok Sumber Trisno Alam Di Kecamatan Bulak Kota Surabaya*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Universitas Negeri Surabaya.
- Muhammad Nuri Shobry. 2017 *Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Program Urban Farming Di Kabupaten Gresik*. Skripsi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Airlangga.
- Atika Krisnawati. 2016 *Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konsep Pertanian Perkotaan (Urban Farming)*. (studi pada Kelompok Tani Elok

*Mekar Sari Kelurahan Semolowaru Kota Surabaya*). Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Universitas Negeri Surabaya.

Budhi Baihakki. 2016. *Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Urban Farming Yayasan Bunga Melati Indonesia (YBMII) di Perigi Baru*. Skripsi Fakultas Ilmu Dahwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi.

Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan.

Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 tentang Ketahanan pangan nasional.

Peraturan Walikota Malang nomor 68 Tahun 2019 tentang kedudukan susunan dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang.

### **Sumber Internet**

Badan Pusat Statistik Kota Malang

<https://malangkota.bps.go.id/dynamictable/2019/05/15/19/jumlah-penduduk-di-kota-malang-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2011-2020.html>

Badan Pusat Statistik Kota Malang

<https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/120/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut.html>

Liputan Enam, *petani dan lahan persawahan “menghilang” di Kota Malang*. terbit 11 Oktober 2018.

<https://www.liputan6.com/regional/read/3664280/petani-dan-lahan-persawahan-menghilang-di-kota-malang>

Jawapos, *lahan pertanian di Kota Malang semakin berkurang*. Terbit 16 Maret 2019.

<https://www.jawapos.com/jpg-today/16/03/2019/lahan-pertanian-di-kota-malang-semakin-berkurang/>